BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya hampir di semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan.

Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat yang akan di tempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu modal transportasi.

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu yang vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dikarenakan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas serta sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru bagi masyarakat Indonesia.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa¹:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Lalu Lintas & Angkutan Jalan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm 8.

perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi yang menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan khususnya di bidang produksi

kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas .

Kemacetan yang menyebabkan simpang siurnya kendaraan bermotor dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan. yang pada akhirnya akan memungkinkan adanya bantuan pak Ogah yang mengambil alih peran polisi. Kenyataan yang ditemui dan dirasakan oleh masyarakat dalam mengatur lalu lintas pak Ogah tidak selalu bisa mengatur lalu lintas dengan baik dan menjamin lalu lintas lancar tetapi pak Ogah membantu para pengendara kendaraan bermotor untuk melakukan pelanggaran lalu lintas, yaitu dengan melanggar marka jalan.

Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, disebutkan bahwa²:

“Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas“.

Pada dasarnya setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa. Kegiatan pengaturan lalu lintas ini dilakukan oleh orang perorang atau sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang. Masyarakat sudah terbiasa dengan adanya pak Ogah yang biasanya

² *Ibid.*

membantu mengatur kemacetan lalu lintas dengan meminta imbalan berupa uang untuk mengambil alih peran polisi dalam mengatur lalu lintas.

Persoalan bagi pak Ogah dalam mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan semakin mendapatkan perhatian dari masyarakat pasalnya banyak pak Ogah yang tidak mau menerima pemberian imbalan berupa uang dari pengendara bermotor karena terlalu sedikit, tidak sesuai dengan yang pak Ogah inginkan, sehingga terjadinya pemerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor.

Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang berisi³ :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Segala sesuatu dimana pun dan kapan pun selalu berpasang pasangan, begitu juga halnya dengan dampak terhadap keberadaan sesuatu. Selain memiliki sisi positif juga terdapat sisi negatif maka begitu juga halnya dengan keberadaan pak Ogah yang selain memiliki dampak positif juga dampak negatif. Sisi positif keberadaan pak Ogah yaitu dapat menggantikan peran polisi dalam mengatasi simpang siurnya kendaraan dalam kemacetan. Sedangkan sisi negatif dari keberadaan pak Ogah yaitu maraknya pak Ogah yang membantu pengendara kendaraan bermotor untuk melanggar marka jalan

³ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 74.

dan pak Ogah yang memeras pengendara kendaraan bermotor. sehingga jika setiap hari hal ini terjadi dan bertambah banyak, maka dapat berdampak atau berpotensi pada timbulnya perpecahan di tengah lalu lintas.

Pasal 200 ayat (1) (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.

Sudah jelas bahwa peran pak Ogah sebagai pengganti Polisi tidaklah benar karena walaupun masyarakat ikut andil dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas, perlu pembinaan sejak dini mengenai lalu lintas serta harus ada sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Apabila terbukti bahwa pak Ogah yang melakukan pemerasan di jalan serta tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai masyarakat peduli keamanan lalu lintas maka dapat di jerat dengan Pasal 275 ayat (1) (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu

Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 28 ayat (1) (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Beberapa pekan lalu ada kasus di Jakarta Utara seorang pengendara kendaraan bermotor yang melintas kemudian terjadi kemacetan sehingga Pak Ogah membantu agar jalan lebih lancar tetapi pak Ogah membantu pengendara dengan melanggar marka jalan lalu pengendara memberikan imbalan berupa uang hanya Rp 500, tetapi pak Ogah tidak menerima dengan uang yang diberikan tersebut, kemudian pak Ogah mengancam dan melakukan pemerasan terhadap pengendara. Kanit Reskrim Polsek Cilincing, AKP Andri Suharto,

mengatakan pihaknya mengamankan pak Ogah yang kerap memalak dan mengancam pengemudi truk kontainer yang melintas menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada dekat dengan pos Polisi tanah merdeka itu.⁴

"Kami sudah amankan pelaku pemalakan yang sering mengancam pengemudi kendaraan yang melintas di Jalan Cakung Cilincing untuk mengisi bahan bakar," Ujar Andri.

Menurutnya, penangkapan terhadap Hadi Septiawan (21) berawal ketika Muhammad Kurniawan (26) pengemudi sopir truk kontainer yang hendak mengisi bahan bakar di SPBU Kebon Baru dipalak.

"Saat itu korban (Kurniawan) dimintai uang oleh pelaku yang menghadang dekat dengan pom bensin karena kondisi arus lalu lintas sedang macet, ia membantu membelokkan dengan melanggar marka jalan, namun setelah dibantu ia meminta uang," lanjutnya.⁵

Andri mengungkapkan, saat itu korban memberikan uang pecahan logam Rp 500 kepada pelaku, namun bukannya menerima uang tersebut, pelaku justru melempar uang tersebut kembali ke dalam arah truk kontainer dan mengancam pelaku.

"Pelaku mengancam akan melukai korban dengan sebuah obeng minus yang sudah ditajamkan di bagian ujung kedua

⁴<http://www.beritasatu.com/hukum-kriminalitas/363041-tak-terima-diberi-rp-500-pak-ogah-ancam-pengguna-jalan-di-semper.html>, Diakses 12 Oktober 2016, Pukul 19.30 Wib.

⁵ *Ibid.*

sisinya, barulah setelah itu korban memberikan uang sebesar Rp 2.500, tapi uang tersebut juga ditolak oleh pelaku," tambah Andri.⁶

Melihat gelagat pelaku yang beringas, korban kemudian berteriak meminta tolong kepada pengendara yang melintas di lokasi tersebut dan membuat para pengendara berkerumun dan menghajar pelaku yang sedang kedapatan membawa obeng tajam.

"Korban yang berteriak kemudian direspon pengemudi lainnya dengan mengeremuni truk korban, kemudian pelaku yang terpojok akhirnya diamuk massa lalu setelahnya kita amankan," lanjutnya.

Luka lebam di bagian muka dan sejumlah bagian tubuhnya membuat Hadi tidak bisa mengelak atau melarikan diri lagi dan langsung dijebloskan ke sel tahanan Polsek Cilincing. Saat diinterogasi, ia mengaku melakukan aksi pemalakan karena memerlukan uang untuk memberi hadiah kepada seorang teman wanitanya yang berulang tahun. Barang bukti yang diamankan pihak kepolisian yakni, selembar uang pecahan Rp 2.000, dua koin uang Rp 500, dan sebuah obeng minus dengan gagang bendera Amerika Serikat.⁷

Kemudian kasus selanjutnya terjadi di Jakarta Barat, lantaran dianggap meresahkan warga, Tim Buru Sergap (Buser) Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat mencokok para pak ogah yang sehari-hari kerap menarik

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

pungutan liar (pungli) di sejumlah ruas jalan wilayah tersebut. Pak Ogah memang sangat mudah dijumpai di berbagai sudut jalanan Ibu Kota. Mereka 'digaruk' oleh jajaran Polsek Taman Sari yang dipimpin AKP Bambang dalam razia cipta kondisi.⁸

Dari operasi tersebut Tim Buser Polsekro Taman Sari Jakarta Barat berhasil mengamankan 11 orang pak ogah. "Karena banyak laporan masyarakat yang resah dengan ulah oknum masyarakat yang menarik pungutan liar alias pak Ogah di Jalan Mangga Besar Raya dan Jalan Pangeran Jayakarta, Tim Buruh Sergap Polsek Metro Taman Sari Polres Metro Jakarta Barat mengambil tindakan tegas," ucap Kapolsek Metro Taman Sari, AKBP Nasriadi, Kamis (8/9/2016).

Operasi itu kata dia, tak hanya dilakukan di satu titik saja, ada beberapa titik sehingga 11 orang tersebut bisa ditangkap. "Hasilnya dari kedua tempat yakni dua orang di Jalan Mangga Besar Raya, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Erwin (17) dan M fikri (20), dan sembilan orang di Jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Fatur (17), Yusuf (26), M. Ridwan (20), Rinaldy (17), Supriyadi (32), Gugun Lesmana (23), Feri (16), Jamin (19) dan Fani (16)," terang Kapolsek.⁹

Nasriadi menambahkan, tindakan para pak Ogah itu saat beraksi terbilang arogan. "Berdasarkan laporan warga, para pelaku sering merusak

⁸<http://news.okezone.com/read/2016/09/08/338/1484412/resahkan-warga-kawanan-pak-ogah-diangkut-polisi>, Diakses 12 Oktober 2016, Pukul 21.00 Wib.

⁹ *Ibid.*

bodi mobil jika pengemudi menolak memberi uang dan berdasarkan laporan inilah kita melakukan penangkapan terhadap 11 orang pelaku pungli di jalan itu," tukasnya.

Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang berisi :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan latarbelakang di atas untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pak Ogah mengenai pelanggaran marka jalan dan pengancaman disertai pemerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang makin marak di jalan raya maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Preman Jalanan (Pak Ogah) Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Melanggar Marka Jalan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 368 KUHP”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang penelitian diatas, maka peneliti membatasi masalah dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan meminta uang secara paksa kepada pengendara kendaraan bermotor yang melanggar marka jalan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pemerasan?
2. Bagaimanakah peranan korban pemerasan yang melanggar marka jalan dihubungkan dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana pemerasan yang dilakukan pak Ogah terhadap pengendara kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa perbuatan meminta uang secara paksa kepada pengendara kendaraan bermotor dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pemerasan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan pengendara kendaraan bermotor dihubungkan dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana pemerasan yang dilakukan pak Ogah terhadap pengendara kendaraan bermotor.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai masalah maraknya pemerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor, serta pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemajuan positif bagi instansi Polri agar di kemudian hari dapat berperan serta dalam upaya peningkatan penegakan hukum dan melindungi masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penanganan serta masukan positif terhadap badan atau organisasi yang menangani permasalahan tindak pidana pengancaman dan pemerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor.
- c. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana pengancaman dan pemerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai negara merdeka, Indonesia memiliki Undang-undang Dasar sebagai langkah politik hukum setelah kemerdekaan pada Tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam alenia ke-empat Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:¹⁰

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sebagai wujud dari tujuan di atas, pemerintah mengeluarkan aturan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala aspek kehidupan yang terjadi di dalam Negara Republik Indonesia ini diatur oleh hukum, tidak terkecuali hal yang mengatur mengenai kesetaraan kedudukan antar manusia. Demi tercapainya kesejahteraan umum yang sesuai

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar (amandemen)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm 8.

dengan tujuan pembangunan nasional, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai akibat dari kemajuan era globalisasi dimana transportasi menjadi semakin maju pesat setiap tahunnya.

Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya menyebutkan bahwa tiap individu masyarakat mempunyai suatu hak untuk memperjangkan hal yang memang telah menjadi hak kodratnya, dalam hal ini diatur dalam Pasal 28 H angka 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa¹¹ :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Hukum adalah bagian terpenting dari suatu negara dimana hukum memberikan peran yang sangat penting dalam menegakkan peraturan yang mengikat pada setiap warga negaranya, tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam ranah pidana jaminan tersebut ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan¹² :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Pasal tersebut menerangkan mengenai keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia; asas legalitas merupakan ukuran untuk menentukan tindak pidana termasuk tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Selain asas legalitas dalam hukum masih terdapat prinsip hukum lain yaitu

¹¹ *Ibid*, hlm 34.

¹² Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 3.

Asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, pasti tidak terlepas kaitannya dengan Teori *Stufen Bouw* atau Teori *Aquo* karya Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam Teori *Aquo* membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana menurut Hans Kelsen bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan.

Susunan norma menurut teori tersebut adalah¹³ :

1. *Staatsfundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. *Staatgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR dan Konvensi.
3. *Formellgesetz* : Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung* : Secara Hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga keputusan Bupati dan Walikota.

Selain asas legalitas dalam hukum masih terdapat prinsip hukum lain yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menurut Van Apeldoorn¹⁴:

“Mewajibkan dalam hukum yang berlaku di suatu negara, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, karena ini akan membuat hukum suatu negara menjadi tidak pasti karena terjadi sebuah kontradiksi”.

¹³ Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory Of Law And State)*, Nusamedia, 2011, Jakarta, Hlm 87.

¹⁴ Wordpress, Pandangan Hukum Ahli -Ahli, <https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/21/hukum-dalam-pandangan-van-apeldoorn/>, Diunduh pada tanggal 22 Oktober 2016, pukul 20.40 Wib,

Asas kepastian hukum ini juga akan membuat hukum tetap terjaga integritasnya dalam sebuah negara. Peraturan yang dibuat dalam pelaksanaannya akan selaras dan bisa mengarahkan rakyat untuk bersikap positif dengan hukum yang berlaku.

Tujuan Hukum Menurut Van Apeldoorn ialah¹⁵:

“Menjamin sebuah kepastian hukum bagi setiap warga Negara, tanpa mengecualikan semua golongan, agar pranata hubungan manusia yang damai”.

Hukum dibagi menjadi berbagai bidang yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini adalah mengenai hukum pidana, hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh perundang-undang dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan atau denda bagi pelanggarnya. Hukum didalamnya pula terdapat aparat yang bertugas untuk menegakkan hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lainnya yang disebut sebagai aparat penegak hukum.

Perbuatan yang bisa dikenai hukuman atau sanksi adalah perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Adapun pengertian pelaku kejahatan adalah:¹⁶

“Orang yang telah melakukan kejahatan, yang dalam arti luasnya lagi seseorang yang melakukan pelanggaran dalam perundangan-undangan yang ada, melanggar hak orang lain serta melanggar norma-norma yang ada dan hidup di masyarakat, tetapi orang yang melakukan kejahatan tidak hanya orang dewasa tanpa terkecuali seorang anak, karena seorang anak pun dapat melakukan suatu kejahatan

¹⁵ Ibid, Hlm 112.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm 11.

dikarenakan beberapa faktor baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Hukum menurut pandangan Max Weber merupakan:¹⁷

“Perpaduan antara konsensus dan paksaan. Dikatakan demikian karena tegaknya tatanan hukum itu berbeda dengan tatanan dari norma sosial lain yang bukan hukum, karena tatanan hukum ditopang sepenuhnya oleh kekuasaan pemaksa yang dipunyai negara, khususnya Hukum Pidana”.

Asas kepastian hukum ini juga akan membuat hukum tetap terjaga integritasnya dalam sebuah negara. Peraturan yang dibuat dalam pelaksanaannya akan selaras dan bisa mengarahkan rakyat untuk bersikap positif dengan hukum yang berlaku.

Mengenai tindak pidana, Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* atau tindak pidana sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.¹⁸ Sedangkan Simons memberikan rumusan yang lebih lengkap mengenai *strafbaar feit*, yaitu sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.¹⁹

Menurut Moeljatno, *strafbaar feit* adalah²⁰:

“Kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan

¹⁷ Wordpress, Pandangan Hukum Menurut Ahli
<https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/21/hukum-dalam-pandangan-max-weber/>, Di unduh pada tanggal 21 Oktober 2016, pukul 20.07 WIB.

¹⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 185.

¹⁹ *Ibid*, hlm 186.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 54-56.

yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijk, onrechtmatigheid*)”.

Sebuah teori lagi yang juga digunakan dalam penelitian ini yaitu *Teory Utilitarianisme* (Teori Kemanfaatan Hukum), Menurut John Stuart Mill²¹:

“Teori kebahagiaan terbesar *“The greatest happiness of the people”* bahwa yang berguna, bermanfaat, dan menguntungkan untuk kaum mayoritas maka itulah yang baik”.

Tindak Pidana pemerasan dan perusakan barang dalam hal ini sudah diatur di dalam KUHP yaitu pada pasal 368, 369 KUHP.

Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang berisi²² :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 369 ayat (1) KUHP, yang berisi²³ :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan

²¹ *Ibid*, Hlm 75.

²² *Ibid*, Andi Hamzah hlm 34

²³ *Ibid*,

piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang berisi²⁴:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan pidananya di atur dalam Bab XX dari Pasal 273 sampai pasal 317.

Pasal 200 ayat (1) (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.

Pasal 200 ayat (3) huruf H Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi :

²⁴ *Ibid*,

(3) Untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan:

H. Penegakan Hukum Lalu Lintas.

Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi:

(1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat di pahami.

Guna mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analitis*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis,

meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami. Sebagaimana diungkapkan Ronny Hanitidjo Soemitro, penelitian *Deskriptif-Analitis* yaitu²⁵:

“Menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”.

Penelitian dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk memberikan data dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi tentang Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Preman Jalanan (Pak Ogah) Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Melanggar Marka Jalan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan *Yuridis-Normatif*,²⁶ yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum dengan mempergunakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan

²⁵ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

²⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm 29.

(*library research*) yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan penunjang bagi data sekunder.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan dari penelitian harus jelas, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada. Dalam penelitian ini data utama yang digunakan adalah data yang sudah jadi (data sekunder), sehingga penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan merupakan tahap penelitian utama. Berkenaan dengan digunakannya pendekatan *Yuridis-Normatif*, maka penelitian yang dilakukan ada dua tahap, antara lain :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan²⁷ adalah penelitian terhadap data sekunder, dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan reaktif kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

²⁷ *Ibid*, hlm 11.

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. .
2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa data yang diperoleh dari kamus hukum, artikel, majalah, koran, maupun internet serta bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komperhensif.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah suatu cara untuk memperoleh data yang bersifat primer. Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dengan cara melakukan pencarian dan pengumpulan data dari instansi terkait dan melakukan wawancara dengan orang-orang terkait dengan persoalan yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari :

- a. Studi dokumen,²⁸ yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang

²⁸ *Ibid*, hlm 52.

- berhubungan dengan permasalahan yang ada pada efektifitas Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Wawancara,²⁹ yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Dinas Pehubungan (DISHUB) Kota Bandung.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, buku-buku ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Ada pun dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa *notebook*, *flashdisk*, dan alat tulis yang berguna untuk melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non't directive interview*) serta menggunakan *tape recorder* untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan di teliti.

²⁹ *Ibid*, hlm 57.

6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul, penulis sebagai instrumen analisis akan menggunakan metode Yuridis-Kualitatif. Metode normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden. Menurut Ronny Hantijo Soemitro yang dimaksud dengan analisis Yuridis-Kualitatif adalah:³⁰

“Analisis data secara Yuridis-Kualitatif adalah cara penelitian yang dihasilkan dari data Deskriptif-Analitis yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa harus menggunakan rumus matematika”.

Digunakannya metode Yuridis-Kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan, dalam hal ini adalah masyarakat khususnya pengguna jalan raya, atas penerapan aturan larangan tindak pidana pemerasan. Dalam analisis data ini penulis telah memperoleh data literatur, perundang-undangan, contoh kasus yang berkaitan, dan hasil wawancara dengan para penegak hukum

³⁰ Ronny Hantijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm 93.

di Indonesia seperti Polisi dan Dinas Perhubungan terkait. Kemudian data tersebut diolah dan akan diperoleh gambaran apakah suatu aturan telah bertentangan dengan aturan yang lainnya, apakah tindak pidana pemerasan yang terjadi dapat dijerat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat, antara lain:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Bandung.

b. Instansi/Lembaga

- 1) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Jalan Sukabumi No 1, Kacapiring, Batununggal Bandung.
- 2) Polisi Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta No. 748 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	JADWAL PENELITIAN					
		Nop- 2016	Des- 2016	Jan- 2017	Feb- 2017	Mar- 2017	Apr- 2017
1	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komperhensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						